

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi gerakan sosial merupakan kajian ilmu sosial politik yang akan dan terus relevan dipakai dalam membantu menjelaskan fenomena kemunculan gerakan sosial. Studi Cliffts (2019) menyatakan bahwa kemunculan gerakan sosial adalah akibat dari ketidakseimbangan formasi sosial antara kelompok dedominasi yang tidak memiliki sumber daya dari nilai-nilai alokasi sosial-politik dengan kelompok dominasi yang memiliki atau bahkan berlimpah dalam penguasaan sumber-sumber dari nilai-nilai alokasi sosial-politik. Yang mana, tujuan umum dari kemunculan gerakan sosial itu sendiri adalah menghendaki terjadinya *Social Change* atau *Social Transformation*.

Salah satu perspektif gerakan sosial yang berkembang saat ini adalah Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*). Kajian Gerakan Sosial Baru (GSB) merupakan hasil konstalasi dari gerakan sosial lama (klasik dan neo-klasik) yang telah lebih dulu berkembang. Secara ringkas, perspektif klasik lebih bernuansa revolusioner dan radikal. Sedangkan, perspektif neo-klasik lebih bernuansa kebangkitan bangsa, nasionalisme dan pembebasan bangsa-bangsa terjajah. Jika dianalogikakan dalam Dialektika Hegel, perspektif klasik dan neo-klasik ini dapat diposisikan sebagai tesis dan anti-tesis.

Berdasarkan hasil analisis Nur Hidayat Sardini (2020), gerakan sosial baru meyakini bahwa gerakan sosial bakal efektif jika tidak melalui perspektif revolusioner, radikal dan nasional. Melainkan melalui perubahan konstelasi dunia dan masing-masing negara, mengubah dan perlunya perubahan-perubahan yang lebih baru, baik oleh akibat perubahan narasi besar, isu/agenda, aktor/basis massa, skala/lapangan, isu-isu spesifik, ideologi gerakan dan metode gerakan. Dari analisis tersebut, dapat diketahui jika gerakan sosial baru saat ini merupakan perspektif yang lebih variatif dan

fleksible dalam menjelaskan fenomena gerakan sosial jika dibandingkan dengan dua perspektif sebelumnya.

Salah satu contoh gerakan sosial yang terverifikasi sebagai gerakan sosial baru adalah gerakan masyarakat adat. Agenda utama dalam gerakan masyarakat adat atau *indigenous movement* adalah memperjuangkan hak politik dan budaya komunitas etnis yang menjadi minoritas sesuai dengan keunikan historis serta praktik budaya yang mereka miliki (Mangga Ismanto, 2017: 125). Menurut Adam Kuper (2003: 395), gerakan masyarakat adat sudah pasti adalah bentuk kontribusi atas upaya pengakuan atas hak kolektif dan pemberdayaan masyarakat adat. Tak ayal, jika perampasan lahan/tanah menjadi alasan populer yang paling sering mengikuti bangkitnya perjuangan dari masyarakat adat guna memperjuangkan hak kolektifnya.

Bedasarkan hasil penelusuran Penulis, terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu perihal gerakan masyarakat adat. Lasron P. Sinurat (2019) melakukan penelitian tentang strategi gerakan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta yang berhasil mempertahankan tanah adatnya dari PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL) sejak tahun 2009. Selain Lasron, Manggala Ismanto (2017) juga pernah melakukan penelitian tentang pembentukan dan praktik gerakan sosial yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Sami dalam mempertahankan sumber daya tanah dan airnya. Suryawan, dkk (2015) juga pernah melakukan penelitian tentang praktik Gerakan Simbolik Kultural Masyarakat Adat Sengwer dalam menghadapi kebijakan *Natural Resource Management Project* (NRMP) yang merupakan penjabaran domestik dari skema global *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD). Penelitian Suryawan tidak hanya melakukan analisis melalui konsep gerakan sosial baru, namun juga teori gerakan sosial politik, marginalisasi pembangunan dan hukum internasional. Satu-satunya penelitian yang dapat dikatakan memiliki relevansi yang sangat erat dengan penelitian Penulis adalah penelitian milik Tiffany Setyo Pratiwi (2016) yang meneliti tentang perjuangan masyarakat SAD Bathin Sembilan di Desa Bungku, Kabupaten Batang Hari. Penelitian yang dilakukan oleh Tiffany Setyo

Pratiwi berusaha untuk mengetahui kemunculan awal dan duduk perkara konflik dan dinamika gerakan yang terjadi.

Penelitian yang Penulis lakukan memiliki perbedaan mencolok dari segi lokus, waktu, isu konflik maupun kerangka teori yang digunakan. Walaupun memiliki kesamaan dalam meneliti gerakan masyarakat adat, namun masyarakat adat yang hendak penulis lakukan penelitian adalah mereka yang hidup termarjinalkan dan dengan stigma negatif bahwa mereka adalah kelompok masyarakat yang tidak cukup pintar karena rendahnya pendidikan serta jauh dari pergaulan modern.

Selain itu, masih minimnya Peneliti yang memfokuskan diri untuk meneliti dinamika gerakan SAD Bathin Sembilan/Bahar Desa Bungku ini dalam perjuangannya melawan praktik perampasan ruang hidup mereka. Kurangnya ketertarikan Peneliti ini justru memantik rasa ingin tahun Penulis tentang bagaimana mereka mampu bertahan di tengah konflik melalui perjuangan selama puluhan tahun.

SAD Bathin Sembilan Desa Bungku adalah salah satu komunitas masyarakat adat di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Sebagai masyarakat adat, mereka memiliki hak kolektif berupa hak garapan, kebun, hak waris dan hak ulayat yang telah dijaga secara turun temurun. Terhadap hak-hak tersebut, kadangkala dirampas oleh perusahaan dan pemerintah yang kurang bertanggung jawab. Inilah yang memantik konflik antara SAD Bathin Sembilan dengan pihak-pihak tersebut.

Diketahui, jika perampasan tanah SAD Bathin Sembilan sudah terjadi sejak masa orde baru, tepatnya tahun 1987. Gerakan sosial SAD yang mulai masif dilakukan sejak kejatuhan Orde Baru. Alasannya karena pada masa Orde Baru yang otoriter, masyarakat tak banyak memiliki kesempatan dan keberanian untuk melakukan perlawanan secara terbuka dan publik atas perampasan lahan masyarakat adat seluas 3.550 hektar di HGU PT. BSU.

Pada tahun 2014, Pemerintah Kab. Batang Hari menetapkan skema 2.000 hektar sebagai resolusi konflik antara SAD Bathin Sembilan Desa Bungku dengan

perusahaan sawit. Akibat dari kebijakan tersebut, gerakan masyarakat SAD Bathin Sembilan terpecah menjadi dua. Hal ini dipicu oleh adanya masyarakat yang setuju dan tidak setuju terhadap penyelesaian konflik oleh pemerintah dengan mengembalikan 2.000 hektar tanah HGU PT. BSU (Berkat Sawit Utama) kepada masyarakat SAD Bathin Sembilan. Bagi kelompok SAD yang menerima penyelesaian konflik tersebut dan pergerakannya berhenti, keadaan itu disebut “*becalmed*”. Sedangkan, bagi kelompok SAD yang menolak penyelesaian konflik karena tidak sesuai dengan tujuan awal pergerakan (pembebasan lahan 3.550 hektar) dan memilih untuk tetap melanjutkan pergerakan, maka keadaan ini disebut “*defensive*”.

Fakta terbaru menunjukkan jika gerakan SAD Bathin Sembilan (*devensife*) masih eksis sampai saat ini. Hal ini dibuktikan melalui Gerakan Jalan Kaki dari Jambi ke Jakarta (Istana Merdeka) dalam rangka memprotes dan menagih langsung janji presiden Jokowi untuk menyelesaikan segera konflik agraria. Dilansir dari *majalahagraria.today* (29/06/2020), SAD Bathin Sembilan melayangkan 9 tuntutan. Dua tuntutan diantaranya adalah meminta kepada Presiden RI, Kementerian ATR dan Bupati Batang Hari untuk mengembalikan lahan 3.550 ha milik SAD berdasarkan Surat Menteri ATR/Kepala BPN RI No. 1373/020/III/2016. Kedua, mengembalikan lahan SAD dan Petani Simpang Macan Desa Bungku yang diklaim oleh PT. BSU seluas ± 600 ha di wilayah kamp perut.

Perjuangan panjang perlawanan terhadap industri perkebunan kelapa sawit yang mengeksploitasi lahan SAD Bathin Sembilan bukanlah tanpa dampak. Menurut Rai Sita (2014: 65), perampasan lahan yang dialami oleh SAD Bathin Sembilan berdampak pada semakin rentannya keamanan nafkah sehari-sehari. Lebih spesifik dijelaskan oleh Ekyn (2017: 106-107) jika perampasan lahan yang berujung konflik ini berdampak pada hubungan kerja sama yang buruk antara SAD Bathin Sembilan dan PT. BSU serta menyebabkan terjadinya kekerasan hingga jatuh korban bagi semua pihak, baik itu SAD Bathin Sembilan, PT. BSU maupun warga sekitar.

Diwartakan dari *ksp.go.id* (09/10/2019), Pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin memiliki tiga kegiatan penting reforma agraria: *Pertama*, mempercepat pelaksanaan redistribusi aset dan perhutanan sosial yang tepat sasaran; *Kedua*, melanjutkan pendampingan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial agar lebih produktif; *Ketiga*, melanjutkan percepatan legalisasi (sertifikasi) atas tanah-tanah milik rakyat, sehingga memiliki kepastian hukum dan mencegah sengketa atas tanah. Melalui agenda reforma agraria Pemerintah Jokowi-Ma'ruf, seharusnya kasus perampasan tanah dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Penelitian yang dirancang oleh Penulis menjadi penting dan menarik, lantaran merupakan permasalahannya yang belum terselesaikan dengan baik sejak zaman Orde Baru. Penelitian ini juga termasuk dalam upaya menindaklanjuti penelitian yang sudah dilakukan oleh Tiffany Setyo Pratiwi di tahun 2016, sehingga nantinya akan memperoleh keterbaharuan informasi. Selain itu, perbedaan dengan penelitian gerakan masyarakat adat umumnya adalah penelitian ini memasukkan variabel keberhasilan gerakan SAD Bathin Sembilan dalam memengaruhi kebijakan publik yang dapat ditilik berdasarkan respon pemerintah terhadap gerakan.

Berangkat dari problematika di atas, Penulis akan berfokus pada bagaimana dinamika gerakan perjuangan agraria SAD Bathin Sembilan di Desa Bungku, Kabupaten Batang Hari selama 6 tahun terakhir, yaitu 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021. Dinamika gerakan sosial yang dimaksud adalah siklus hidup gerakan sosial yang tentunya tidak terjadi secara ajek, namun mengalami masa naik turun/fluktuatif. Biasanya, dinamika gerakan sosial dipengaruhi oleh kegagalan dan keberhasilan gerakan, semangat gerakan dan sebagainya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana dinamika gerakan perjuangan agraria SAD Bathin Sembilan, Desa Bungku, Kabupaten Batang Hari dalam kurun waktu 2016-2021?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika gerakan perjuangan agraria SAD Bathin Sembilan, Desa Bungku, Kabupaten Batang Hari dalam kurun waktu 2016-2021.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat secara Teoritis

Penelitian tentang gerakan perjuangan agraria SAD Bathin Sembilan, Desa Bungku, Kabupaten Batang Hari ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi Penulis maupun Pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi studi gerakan sosial, khususnya fenomena gerakan masyarakat adat serta sebagai rujukan bagi penelitian sejenis di kemudian hari.

1.4.2 Manfaat secara Praktis

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih memberikan atensinya pada kasus konflik lahan masyarakat adat, yang bahkan sudah terjadi selama puluhan tahun, dengan kebijakan progresif agar dapat menguntungkan berbagai pihak terkait.

Bagi LSM/Pendamping, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam strategi pemberian advokasi kepada SAD Bathin Sembilan. Tujuannya agar pendamping dapat memahami kelemahan advokasi selama ini dan memperbaikinya untuk strategi advokasi ke depan

Bagi SAD Bathin Sembilan, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menganalisa dinamika gerakan perjuangan agraria yang telah dilakukan dan sebagai bahan evaluasi untuk mengupayakan gerakan-gerakan selanjutnya yang lebih kreatif dan inovatif sehingga tujuan gerakan dapat terealisasikan.

Bagi para sarjana, penelitian ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan untuk semakin peduli dan tertarik melakukan penelitian tentang gerakan masyarakat adat, khususnya gerakan masyarakat SAD Bathin Sembilan, Desa Bungku, Kabupaten Batang Hari.

1.5 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, Penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian Penulis. Sebelumnya pada Sub Bab Latar Belakang, Penulis telah sedikit menjelaskan tentang penelitian memiliki relevansi terhadap penelitian ini. Namun pada kesempatan ini, Penulis akan memaparkan secara lebih komprehensif terkait penelitian terdahulu yang relevan dan sejenis tersebut.

Pada tahun 2016, Tiffany Setyo Pratiwi melakukan penelitian tentang tentang gerakan masyarakat SAD Bathin Sembilan di Desa Bungku, Kabupaten Batang Hari, yang memperjuangkan areal lahan seluas 3.550 hektar di dalam HGU PT. Asiatic Persada yang saat ini bernama PT. Berkat Sawit Utama (BSU). Tiffany Setyo Pratiwi juga berusaha untuk mengetahui kemunculan awal dan duduk perkara konflik agraria antara SAD Bathin Sembilan dengan PT. BSU. Penelitian Tiffany Setyo Pratiwi menghasilkan fakta bahwa gerakan masyarakat SAD Bathin Sembilan terpecah menjadi dua akibat penyelesaian konflik dari pemerintah melalui skema 2.000 hektar.

Selain di Jambi, penelitian tentang gerakan masyarakat adat juga terjadi di Sumatra Utara. Lasron P. Sinurat di tahun 2019 meneliti tentang gerakan masyarakat adat Pandumaan-Sipatuhuta selama Era Reformasi. Penelitian ini menjelaskan tentang

strategi perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta sampai berhasil mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah dan keluar dari konsesi PT. TPL (Toba Pulp Lestari) seluas 5.172 hektar serta hak atas tanah masyarakat hukum adat tersebut. Penelitian ini menyajikan upaya-upaya yang sudah dilakukan selama proses gerakan mempertahankan tanah adat.

Tidak hanya di dalam negeri, penelitian sejenis juga terjadi di luar negeri. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Manggala Ismanto di 2017 tentang Gerakan masyarakat adat Sami di Norwegia. Penelitian ini ingin melihat bagaimana pembentukan gerakan dan bagaimana praktik gerakan sosial yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Sami dalam mempertahankan sumberdaya tanah dan airnya sebagai suatu kelompok minoritas. Penelitian ini menyajikan upaya-upaya perjuangan dalam mempertahankan haknya. Salah satu bentuk produk yang dihasilkan adalah *Finnmark Act* (Perjanjian Finnmark). Walaupun sudah terdapat perjanjian tersebut, masih terdapat kekhawatiran di masa depan jika hanya penduduk Sami saja yang bisa mengakses sumber daya dan menyingkirkan penduduk lain yang dari dulu juga memiliki akses yang sama di area tersebut.

Bahkan di Kenya sudah pernah dilakukan penelitian tentang gerakan kelompok masyarakat marginal ini. IWW Suryawan, dkk. berkesempatan untuk meneliti Gerakan simbolik kultural masyarakat adat Sengwer dalam merespon program pemerintah. Kebijakan *Natural Resource Management Project* (NRMP) Kenya yang merupakan penjabaran domestik dari skema global *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD). Hal ini menyebabkan banyak kasus penggusuran dan pembakaran pada pemukiman Masyarakat Adat Sengwer. Penelitian ini menampilkan praktik gerakan yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Sengwer dengan tidak hanya melakukan analisis melalui konsep Gerakan Sosial Baru, namun juga teori gerakan sosial politik dan marginalisasi pembangunan

Penelitian yang Penulis lakukan memiliki perbedaan mencolok dari segi lokus, waktu, isu konflik maupun kerangka teori yang digunakan. Walaupun memiliki kesamaan dalam meneliti gerakan masyarakat adat, namun masyarakat adat yang hendak penulis lakukan penelitian adalah mereka yang hidup termarginalkan dan dengan stigma negatif bahwa mereka adalah kelompok masyarakat yang tidak cukup pintar karena rendahnya pendidikan serta jauh dari pergaulan modern.

Selain itu, masih minimnya Peneliti yang memfokuskan diri untuk meneliti dinamika gerakan SAD Bathin Sembilan/Bahar Desa Bungku ini dalam perjuangannya melawan praktik perampasan ruang hidup mereka. Kurangnya ketertarikan Peneliti ini justru memantik rasa ingin tahun Penulis tentang bagaimana mereka mampu bertahan di tengah konflik melalui perjuangan selama puluhan tahun.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Paradigma Gerakan Sosial Baru (GSB)

1.6.1.1 New Social Movement Theory

Teori Gerakan Sosial Baru adalah basis kritik terhadap Teori Gerakan Sosial Klasik yang telah lebih dulu ada. Teori Gerakan Sosial Klasik dominan direfleksikan melalui perjuangan kelas oleh kaum buruh di sekitar proses produksi. Tak ayal, Gerakan Sosial Klasik lebih banyak dipengaruhi oleh Marxist Theory dalam perspektifnya. Wacana gerakan yang sering digaungkan publik di periode Gerakan Sosial Klasik ini adalah “revolusi kelas” dan “anti-kapitalisme”. Singkatnya, gerakan sosial pada masa ini lahir dari rahim perjuangan kelas karena adanya kesadaran kelas. Gerakan Sosial Klasik menganggap jika suatu gerakan sosial akan efektif apabila dilakukan dengan cara radikal dan revolusioner.

Sedangkan dalam Teori Gerakan Sosial Baru, gerakan sosial dipercayai akan efektif apabila tidak selalu melalui perspektif revolusioner, radikal, dan nasional,

namun dengan perubahan konstelasi dunia dan masing-masing negara, mengubah dan perlunya perubahan-perubahan yang lebih baru, baik oleh akibat perubahan narasi besar, isu atau agenda, aktor atau basis massa, skala atau lapangan, isu-isu spesifik, ideologi gerakan dan metode gerakan. Di sini lebih menekankan jika Gerakan Sosial Baru memiliki tampilan yang lebih bersifat plural, seperti gerakan anti nuklir, gerakan feminisme, gerakan kultural, gerakan kaum marjinal dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang dipercayai oleh Cohen (1985) dan Melucci (1989) (dalam Buechler, 1995: 442), bahwa secara teori Gerakan Sosial Baru menitikberatkan kemunculan tindakan simbolik dalam suatu kelompok masyarakat sipil atau lingkungan kulturalnya sebagai wadah atau arena untuk tindakan kolektifnya disamping tindakan instrumental dalam lingkungan politik atau negara. Tampak jika dalam Teori Gerakan Sosial Baru terdapat perubahan konsentrasi, di mana berubahnya media hubung antara masyarakat sipil dan negara serta berubahnya tatanan dan representasi masyarakat kontemporer itu sendiri. Gerakan Sosial Baru menaruh asumsi bahwa komunitas masyarakat sipil sedang mengalami peluruhan, ruang sosialnya telah mengalami penciutan dan digerogeti oleh kemampuan kontrol negara.

Ketimbang memfokuskan sasaran gerakan kepada kelompok dominasi dalam struktural kapitalisme, Gerakan Sosial Baru memiliki sasaran kelompok dominasi yang lebih variatif, seperti neo-kapitalisme, neo-imperialisme, neo-liberalisme, baik di level internasional maupun di masing-masing negara serta kelompok dominasi kolaborasi antara manca dan domestik dengan nuansa-nuansa politik, ekonomi, dan sosial-budaya hegemonik (Analisis Nur Hidayat Sardini, 2019). Jika kita mengambil kasus di dalam negeri, kelompok dominasi bisa berupa oligarki negara dengan perusahaan baik di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, plutokrasi, dan hegemoni kelompok mayoritas.

Namun demikian, Teori Gerakan Sosial Baru tidak menolak secara mentah-mentah terhadap Teori Kelas milik Karl Marx. Dalam beberapa kesempatan, Gerakan

Sosial Baru masih meminjam pemikiran Marxist tentang mobilisasi massa, perjuangan, kesadaran, dan solidaritas. Hal yang perlu digarisbawahi adalah Gerakan Sosial Baru menolak cara-cara revolusioner dan radikal dalam proses mewujudkan perubahan sosial. Metode gerakan yang lebih dipilih sebagai jalan keluar adalah melalui teknik lobi pejabat, demonstrasi, *boycott* dan berbagai aksi plural lainnya. Di sisi lain, Gerakan Sosial Baru turut menerapkan metode-metode politik, penggalangan media dan kelompok strategis sebagai pendamping maupun kolaborator dan metode-metode lainnya.

Abercrombie, dkk. (2016: 358) menawarkan 4 karakteristik untuk mengidentifikasi Gerakan Sosial Baru, antara lain:

1. Tujuan. Selain bertujuan untuk mencapai transformasi atau perubahan sosial, Gerakan Sosial Baru juga bertujuan untuk membangun keotonoman suatu komunitas atau kelompok masyarakat sebagai subjek sosial. Adanya kecenderungan untuk mencapai perubahan terhadap nilai, budaya dan formasi kekuasaan yang berpihak terhadap orientasi yang diperjuangkan.
2. Basis Sosial Isu. Tidak seperti Gerakan Sosial Lama/Klasik yang berfokus pada isu pertentangan kelas, Gerakan Sosial Baru mengambil isu-isu spesifik seperti hak asasi manusia, perempuan dan gender, advokasi buruh, perampasan lahan dan seterusnya.
3. Perangkat Aksi. Gerakan Sosial Baru memiliki fleksibilitas dalam metode aksinya. Lantaran yang menjadi orientasi di dalam Gerakan Sosial Baru ini adalah tujuannya, yakni memengaruhi pengambilan keputusan negara, dalam bentuk perubahan nilai, sikap dan pro-publik lainnya.
4. Organisasi. Dalam pengelolaan gerakan, Gerakan Sosial Baru juga berpedoman pada fleksibilitas. Gerakannya yang plural, menyebabkan Gerakan Sosial Baru dapat berkolaborasi dengan masyarakat kelas menengah maupun bawah. Karena yang dipentingkan adalah bagaimana aktor-aktor Gerakan Sosial Baru ini mampu atau berhasil memengaruhi pengambilan keputusan resmi.

1.6.1.2 The Identity-Oriented Theory

Menurut Rajendra Singh (dalam Joni Rusmanto, 2013: 25), setidaknya dalam periode Gerakan Sosial Baru paling tidak terdapat dua aliran utama (*mainstream*) yaitu teori mobilisasi sumber daya (*resources mobilization theory*) yang muncul di Amerika Serikat dan teori berorientasi identitas (*The Identity-Oriented Theory*) yang berasal dari Eropa. Teori berorientasi identitas hadir sebagai kritik terhadap basis rasionalisme dan materialisme dari teori mobilisasi sumber daya yang dianggap tidak cukup memadai dalam usaha menjelaskan fenomena Gerakan Sosial Baru. Teori mobilisasi sumber daya dianggap gagal dalam menjelaskan beberapa ekspresi dari bentuk Gerakan Sosial Baru, seperti: gerakan perlucutan senjata, gerakan lingkungan, gerakan feminis, gerakan damai dan gerakan kebebasan lokal (Singh, dalam Oman Sukmana, 2016: 158-159). Di sisi yang lain, Teori Berorientasi Identitas memfokuskan diri untuk membahas tentang integritas dan solidaritas dari kumpulan individu yang melakukan gerakan sosial atau *collective actions*.

Konsep berorientasi identitas acap kali digunakan untuk menjelaskan fenomena gerakan sosial berbasis masyarakat adat/etnis/lokal. Penelitian Lasron (2019) tentang konflik agraria antara Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta dengan PT. Toba Pulp Lestari mengungkapkan jika perjuangan masyarakat adat didasarkan atas kesadaran identitas yang melekat dan kesadaran atas tanah adatnya yang diklaim sebagai hutan negara. Pun, penelitian Suharko (2006) tentang gerakan petani di Indonesia dalam rangka mempertahankan lahannya juga menggunakan konsep Gerakan Sosial Baru dengan variabel solidaritas dan identitas kolektif sebagai alat analisisnya. Contoh lainnya seperti perjuangan masyarakat adat Sami untuk memperoleh hak mandiri dalam mengelola sumber daya alam (Mangga, 2017). Dikatakan jika masyarakat adat Sami menjadi aktor dalam gerakan sosial baru yang mendasarkan perjuangannya pada identitas maupun otonomi.

Joni Rusmanto (2013) mengatakan jika terdapat kesepakatan umum bahwa gerakan berorientasi identitas dan aksi kolektif (*collective action*) adalah ekspresi pencarian manusia terhadap identitas, otonomi dan pengakuan. Perlawanan yang dilakukan oleh SAD Bathin Sembilan merupakan refleksi dalam upaya memperoleh pengakuan atas hak tanah yang dirampas oleh negara dan perusahaan. Dalam buku yang ditulis oleh Rian Hidayat (2012) tentang sejarah asal-usul, kebudayaan dan perjuangan hak SAD Batin Sembilan, dikatakan jika pada konteks perjuangan hak, sebuah identitas memang menjadi sangat penting untuk dimunculkan sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap dominasi kelompok mayoritas atau pembeda dari kelompok lainnya dalam perjuangan hak.

Dalam cermat Penulis, Paradigma gerakan sosial baru berorientasi identitas merupakan basis teori yang tepat dalam rangka sebagai alat analisis untuk melihat fenomena gerakan masyarakat adat (etnis) yang kental akan identitasnya. Tulisan-tulisan sebelumnya telah menjadi bukti konkrit tentang bagaimana peran sentral suatu identitas dalam melihat fenomena gerakan sosial, khususnya gerakan sosial berlatar etnis dalam memperjuangkan hak kolektifnya.

Hunt dan Benford (dalam Snow, Soule & Kriesi, 2004: 450) menyatakan jika beberapa penelitian yang secara spesifik/khusus mengkaji perihal Gerakan Sosial Baru menunjukkan jika aksi gerakan kolektif (*movement collective action*) muncul secara langsung dari identitas kolektif dan terdapat asosiasi diantara keduanya. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa identitas kolektif dan konsep-konsep lainnya yang bersinggungan seperti komitmen (*commitment*) dan solidaritas (*solidarity*) merupakan kemajuan yang sangat menarik dalam upaya mengembangkan dan memafhumi studi gerakan sosial.

Apabila ditarik benang merah dari jabaran perspektif teori berorientasi identitas yang dikemukakan oleh Hunt dan Benford, maka kita akan dihantarkan pada faktor-faktor determinan gerakan sosial, antara lain:

1. *Collective Identity* (Identitas Kolektif). Secara umum, identitas kolektif berupaya menerangkan bahwa suatu kelompok terdiri atas individu-individu yang memiliki kepentingan (*interest*), nilai (*values*), perasaan (*feelings*) dan tujuan (*goals*) bersama yang diekspresikan dalam *cultural materials*, seperti: nama (*names*), simbol (*symbols*), ritual (*rituals*), narasi (*narratives*), pakaian (*clothing*), gaya verbal (*verbal styles*) dan sebagainya. Pendapat ini senada dengan yang dikemukakan oleh Polletta dan Jasper (2001: 284) bahwa identitas kolektif adalah:

“an individual’s cognitive, moral, and emotional connections with a broader community, category, practice, or institution. It is a perception of a shared status or relation, which may be imagined rather than experienced directly, and it is distinct from personal identities, although it may form part of a personal identity”

2. *Solidarity* (Solidaritas). Kata kunci dalam solidaritas adalah kolektivitas. *Esprit de corps* menunjukkan bahwa solidaritas memiliki dua aspek utama, yaitu sekumpulan/konfederasi yang dipahami sebagai kolektivitas dan semangat yang melibatkan perasaan identifikasi dengan kelompok tersebut. Selaras dengan pendapat Oman Sukmana (2016: 163) yang mengatakan bahwa solidaritas memberikan perhatian kepada tingkat dari kohesivitas sosial yang eksis dalam dan bersama kelompok. Solidaritas melakukan eksplorasi tentang hubungan individu dan kolektif dengan fokus utama pada kolektivitas.
3. *Commitment* (Komitmen). Kata kunci dari komitmen adalah konsisten. Ditambahkan oleh Zurcher and Snow (dalam Snow, Soule, & Kriesi, 2004: 440), *The staying power* merupakan fungsi dari sejauh mana disposisi, kepentingan, dan pandangan dunia individu menjadi terkait dengan tujuan, ideologi, dan persyaratan internal gerakan sebagai kolektivitas yang terorganisir.

Proses pembentukan dialektika antara identitas kolektif, solidaritas dan komitmen yang memiliki hubungan timbal balik, sebagian besar merupakan masalah kerja emosi. Pekerjaan emosi, yang sejalan dengan konstruksi identitas kolektif,

bukanlah jalan satu arah dengan hanya peserta gerakan yang melakukan investasi emosional. Sebaliknya, agar solidaritas dan komitmen terwujud, kesan bahwa kolektivitas juga ditanamkan secara emosional harus disampaikan. Emosi yang dimaksud dapat berupa motivasi melakukan gerakan sosial. Motivasi ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana tiap-tiap individu menginterpretasikan gerakan sosial yang dilakukan, biasanya variabel untung dan rugi sangat mendominasi.

Pemikiran Hunt dan Benford tentang identitas kolektif, solidaritas dan komitmen dalam gerakan sosial akan digunakan sebagai kaca mata penelitian ini. Identitas kolektif digunakan untuk melihat bagaimana kepentingan, nilai, perasaan dan tujuan gerakan perjuangan agraria yang dilakukan oleh SAD Bathin Sembilan selama 6 tahun terakhir. Sebagai kumpulan individu yang membawa materi budaya kelompok, adanya identitas pribadi yang terlalu eksis dapat menjadi faktor penghambat dalam pembentukan identitas kelompok. Jika identitas kelompok tidak tercapai, maka dinamika gerakan akan mengalami penurunan kualitas dan tujuan gerakan semakin sulit terealisasikan. Sebaliknya, jika identitas kelompok dapat dikonsolidasikan secara penuh dan baik, maka akan semakin dekat dengan keberhasilan gerakan sosial.

Sedangkan solidaritas digunakan untuk melihat semangat perjuangan SAD Bathin Sembilan dalam upaya mencapai tujuan gerakan sosial. Semangat ini dibentuk oleh hubungan identitas antar individu yang tergabung dalam kelompok. Solidaritas akan melihat usaha bersama atau praktik gotong royong yang telah dilakukan oleh SAD Bathin Sembilan dalam membangun gerakan sosial selama 6 tahun terakhir. Semakin tinggi tingkat kolektivitas kelompok, maka rasa solidaritas akan semakin kuat dan begitu sebaliknya.

Terkahir adalah komitmen. Komitmen berusaha melihat sejauh mana gerakan perjuangan agraria SAD Bathin Sembilan akan terus eksis sampai tujuan gerakan direalisasikan oleh pemegang otoritas. Motivasi sangat memengaruhi tingkat komitmen yang dipegang oleh tiap individu dalam kelompok. Sehingga dalam hal ini,

tujuan dari gerakan sosial tidak lagi melekat pada diri kelompok, namun sejauh mana tujuan tersebut terpatri dalam benak tiap-tiap individu dalam kelompok.

1.6.1.3 The Indigenous Movement Theory

Salah satu gerakan yang diakui sebagai bagian dari Gerakan Sosial Baru adalah Gerakan Masyarakat Adat. Gerakan yang kental akan kultur atau nilai-nilai budaya sebagai identitas murni ini jauh dari kesan radikal dan revolusioner. Dalam gerakan masyarakat adat kontemporer nasional, mereka tidak terlalu peduli untuk menguasai kekuasaan politik dalam suatu negara, namun lebih menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya yang telah diwariskan secara turun-temurun sebagai suatu entitas otonom.

Duane Champagne (2016: 8), seorang profesor di Departemen Sosiologi, University of California, Los Angeles, pernah mengatakan dalam tulisannya jika gerakan masyarakat adat bukanlah upaya untuk menciptakan institusi yang bersatu secara politik atau budaya untuk menantang negara atau komunitas internasional. Gerakan ini terdiri dari masyarakat adat yang memiliki kepentingan bersama dalam melindungi wilayah, dan otonomi budaya dan politik dari ancaman yang dihadirkan oleh kepentingan dan pemaksaan politik, ekonomi, dan budaya di sekitar negara. Dalam gerakan masyarakat adat, kelompok-kelompok adat memobilisasi dan mengikat bersama-sama untuk semakin berpartisipasi dalam masyarakat sipil internasional maupun negara guna melindungi kepentingan bersama.

Bentuk gerakan masyarakat adat ini mengingatkan kita pada komentar Marx tentang gerakan sosial yang tidak efektif di antara para petani Prancis yang menyerupai 'sekarung kentang' (dalam Duane Champagne, 2016: 9). Sekarung kentang yang ia maksudkan adalah mereka terdiri dari kelompok-kelompok yang independen secara ekonomi dan politik yang memiliki kepentingan kelas yang sama. Namun, dalam gerakan masyarakat adat, tujuan utamanya adalah melestarikan 'karung kentang' yang terdiri dari masyarakat adat yang otonom secara kultural dan politik. Gerakan ini tidak

memproyeksikan perubahan kelembagaan di negara atau lembaga internasional, hanya sejauh membuat hak masyarakat adat diakui dan dilindungi.

Atas dasar hal tersebut, kadang kala negara tidak mengakui dan melindungi atas hak masyarakat adat. Perampasan terhadap ruang hidup masyarakat adat yang telah dikelola selama puluhan tahun secara turun temurun dirampas oleh negara melalui sektor swasta. Lahan masyarakat adat yang diklaim tidak memiliki syarat-syarat yang utuh untuk dikatakan sebagai tanah mereka, membuat negara dengan segala legitimasinya membuat peraturan yang memihak pada kepentingan praktik neoliberal.

Masyarakat adat dituntut untuk melakukan perlawanan terhadap kesewenangan negara yang tidak mengakui otonomi mereka dalam mengelola ruang hidup atau lahan warisan. Mereka yang minim pendidikan menyebabkan mereka harus keluar dari tempat tinggal mereka untuk mencari bantuan. Kalangan masyarakat kelas menengah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada akhirnya turun tangan untuk mengadvokasi gerakan masyarakat adat.

Kehadiran kalangan kelas menengah menjadi salah satu faktor yang memperkuat eksistensi gerakan masyarakat adat sebagai gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru tidak menjadikan masyarakat adat sebagai satu-satunya aktor penggerak, namun juga terdapat kalangan LSM, mahasiswa, akademisi dan kalangan kelas menengah lainnya yang turut menjadi bagian tak terpisahkan dari gerakan masyarakat adat.

1.6.2 Keberhasilan Gerakan Sosial

Keberhasilan suatu gerakan sosial dapat diukur melalui realisasi tujuan/tuntutan gerakan sosial oleh pemegang otoritas. Artinya, gerakan tersebut mampu merubah kebijakan publik sebelumnya, menjadi kebijakan publik yang baru yang dapat mengakomodir tuntutan-tuntutan yang dilayangkan dalam wadah gerakan sosial. Karena seyogyanya, tujuan dari suatu gerakan sosial adalah *social transformation*, salah

satunya melalui perubahan kebijakan publik yang mendapatkan legislasi dari pemegang otoritas.

Menilik pada kaca mata *public policy*, Schumeker (dalam Della Porta dan Diani, 1999: 231) memberikan lima tingkat responsivitas terhadap keberhasilan gerakan sosial dalam memengaruhi kebijakan publik. *Pertama*, gagasan tentang "responsivitas akses" yang menunjukkan sejauh mana pemegang otoritas bersedia mendengarkan keprihatinan kelompok yang menuntut melalui gerakan sosial. Jika permintaan tersebut dijadikan isu dan ditempatkan dalam agenda kebijakan publik, maka telah terjadi jenis responsivitas *kedua* yang diberi label "responsivitas agenda". Apabila usulan tersebut diaktualisasikan menjadi sebuah kebijakan (khususnya pengesahan legislasi), maka jenis respon *ketiga* telah tercapai, yaitu gagasan tentang "responsivitas kebijakan". Jenis yang ketiga ini menunjukkan sejauh mana pemegang otoritas dalam sistem politik membuat peraturan atau kebijakan yang selaras dengan tuntutan nyata dari kelompok-kelompok protes. Jika langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa peraturan atau kebijakan tersebut ditegakkan sepenuhnya, maka jenis respon *keempat* telah tercapai, yaitu "ketanggapan keluaran". Apabila peraturan atau kebijakan tersebut dapat menjawab tuntutan gerakan yang mendasarinya, barulah jenis respon *kelima* yang tercapai, yaitu "tanggap dampak".

Skema yang ditawarkan oleh Schumeker, kemudian dikembangkan dan ditambahkan oleh Burstein, dkk. (dalam Dimpos Manulu, 2007: 38). Berikut Penulis sajikan jenis-jenis responsivitas terhadap keberhasilan gerakan sosial dalam memengaruhi kebijakan publik:

Tabel 1.2

Jenis-Jenis Responsivitas Terhadap Keberhasilan Gerakan Sosial Dalam Memengaruhi Kebijakan Publik

Jenis	Contoh Respon
-------	---------------

Akses	Partisipan gerakan menyampaikan petisi dalam rapat dengar pendapat di parlemen/kongres
Agenda	Daftar tuntutan gerakan diperkenalkan di parlemen
Kebijakan	Legislasi yang diharapkan diadopsi
Hasil	Legislasi diselenggarakan sebagaimana diharapkan oleh gerakan
Dampak	Legislasi mencapai konsekuensi-konsekuensi yang diharapkan
Struktural	Perubahan sistem dan meningkatnya pengaruh gerakan

Sumber: Dimpos Manulu

Jenis pertama sampai kelima merupakan penjelasan terhadap lima responsivitas kebijakan milik Schumeker. Namun, Burstein, dkk. menambahkan satu poin baru, yaitu poin keenam tentang respon “struktural”. Respon ini hadir dengan ditandai oleh perubahan sistem yang terjadi dan meningkatnya pengaruh gerakan terhadap kemunculan gerakan-gerakan lainnya dalam merespon ketidakadilan dan kesewenangan.

Gerakan perjuangan agraria yang dilakukan oleh SAD Bathin Sembilan bertujuan untuk memengaruhi kebijakan publik terkait penyelesaian konflik agraria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Gerakan ini menentang *status quo* yang telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa adanya bentuk penyelesaian konflik yang efektif. *Status quo* adalah perampasan terhadap areal lahan seluas 3.550 hektar milik SAD Bathin Sembilan Desa Bungku yang terletak di dalam HGU perusahaan dan kebijakan pemerintah tentang skema 2.000 hektar sebagai penyelesaian konflik. Alhasil, sampai saat ini gerakan protes masih terus dilakukan untuk menuntut penyelesaian konflik agraria tersebut.

Pemikiran Schumeker, yang disempurnakan oleh Burstein, dkk., oleh Penulis digunakan untuk melihat sejauh mana gerakan perjuangan agraria SAD Bathin Sembilan dapat memengaruhi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sejauh mana gerakan sosial dapat menempuh fase responsivitas terhadap keberhasilan gerakan

sosial dalam memengaruhi kebijakan publik. Sehingga, keluaran dari penelitian ini akan menjawab apakah gerakan perjuangan agraria SAD Bathin Sembilan selama kurun waktu 2016-2021 dapat dikatakan berhasil atau tidak. Sebagaimana yang telah Penulis paparkan sebelumnya, dinamika gerakan sosial yang dimaksud adalah siklus hidup gerakan sosial yang tentunya tidak terjadi secara ajek, namun mengalami masa naik turun/fluktuatif. Biasanya, dinamika gerakan sosial dipengaruhi oleh kegagalan dan keberhasilan gerakan, semangat gerakan dan sebagainya.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang membantu Penulis dalam melakukan analisis adalah data primer dan data sekunder. Data tersebut selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif, yaitu menggambarkan dinamika gerakan perjuangan agraria SAD Bathin Sembilan selama kurun waktu 2016-2021.

Meminjam pemikiran Creswell (1994: 162), penelitian kualitatif menitikberatkan pada proses yang terjadi sebagai produk atau hasil, sehingga Peneliti merasa sangat tertarik untuk memahami bagaimana sesuatu terjadi, memengaruhi dan merespon. Oleh karena itu, dari 5 jenis penelitian yang diajukan oleh Creswell, penelitian ini menggunakan jenis penelitian Studi Kasus. Studi kasus berfokus untuk mendalami suatu kasus secara lebih mendalam. Dengan memahami kasus secara mendalam, maka Peneliti akan menangkap arti penting penelitiannya bagi kepentingan masyarakat, organisasi atau komunitas tertentu (Raco, 2010: 49).

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini akan dilakukan di Sekretariat Bersama SAD Bathin Sembilan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jambi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Batang Hari, dan lokasi

Pendamping SAD Bathin Sembilan/LSM. Lokasi penelitian ini akan menyesuaikan dengan keberadaan lokasi narasumber dalam penelitian ini.

1.7.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan analisis Suharsimi (2016: 26), data primer adalah perolehan data secara langsung dengan pemberiannya pada yang mengumpulkan data tersebut. Dapat dikatakan jika data primer ini merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada Peneliti. Sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini. Mengingat situasi Pandemi Covid-19, wawancara dapat dilakukan secara *offline* maupun *online*. Hal ini akan sangat tergantung pada kondisi dan lokasi narasumber yang hendak diwawancarai oleh Penulis.

Sedangkan data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan data kepada Peneliti, contohnya melalui perantara orang lain atau dokumen tertentu. Sumber data sekunder diperoleh dari hasil tinjauan literatur atau kepustakaan berdasarkan dokumen yang tersedia dan memiliki relevansi dengan penelitian ini. Dokumen yang tersedia dapat diperoleh secara *online* maupun *offline*. Data yang diperoleh secara *online* dapat berupa artikel media *online*, jurnal *online* dan buku-buku yang dapat diakses secara daring. Sedangkan data yang diperoleh secara *offline* dapat diperoleh langsung dari pemberian narasumber atau pihak-pihak terkait yang dapat dipertanggungjawabkan asal usul dan validasi terhadap dokumen tersebut.

1.7.4 Instrumen Penelitian

Sudah menjadi suatu wawasan umum dalam dunia riset bahwa instrumen utama dalam suatu penelitian adalah manusia itu sendiri, terutam Peneliti. Namun demikian, tetap diperlukan instrumen pendukung yang membantu Peneliti dalam upaya memperoleh informasi atau data penelitian. Oleh Gulo (2002: 123), Instrumen itu

disebut sebagai Pedoman Pengahayatan atau Pedoman Wawancara atau Kuesioner atau Pedoman Dokumenter (d disesuaikan dengan metode yang dipergunakan).

Instrumen pendukung atau bantuan yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam penelitian ini adalah buku catatan dan alat tulis, alat rekaman, dokumen-dokumen pendukung dan pedoman wawancara. Buku catatan dan alat tulis merupakan instrumen pendukung yang digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang mendukung data penelitian. Alat rekaman berfungsi untuk membantu Peneliti yang mengalami kesulitan dalam kegiatan pencatatan secara manual. Alat rekaman yang digunakan oleh Peneliti adalah aplikasi yang tersedia di *smartphone* untuk merekam hasil pelaksanaan wawancara. Dokumen-dokumen pendukung digunakan sebagai data pendukung untuk menyempurnakan data wawancara. Sedangkan pedoman wawancara yang telah Penulis susun sebagai berikut:

1. SAD Bathin Sembilan

Pedoman wawancara untuk SAD Bathin Sembilan berisi indikator-indikator pokok pertanyaan yang akan Penulis ajukan kepada narasumber tersebut. Narasumber dari SAD Bathin Sembilan akan dipilih berdasarkan kapasitas narasumber yang sekiranya mampu memahami dinamika gerakan perjuangan SAD Bathin Sembilan dari tahun 2016-2021.

Tabel 1.3

Pedoman Wawancara Narasumber SAD Bathin Sembilan

No.	Indikator-Indikator Pokok
1.	Penyebab utama kemunculan konflik konflik SAD Bathin Sembilan terhadap industri perkebunan kelapa sawit.
2.	Tuntutan yang dilayangkan oleh SAD Bathin Sembilan melalui gerakan sosial.
3.	Proses yang dilakukan dalam upaya melakukan gerakan sosial.

4.	Pihak-pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam melakukan gerakan sosial.
5.	Hambatan atau kesulitan yang dirasakan dalam upaya melakukan gerakan sosial.
6.	Upaya yang dilakukan dalam membangun solidaritas anggota aksi ketika melakukan gerakan.
7.	Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan motivasi setiap anggota aksi.
8.	Respon kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam menyikapi gerakan sosial yang dilakukan oleh SAD Bathin Sembilan.

Sumber: Pribadi

2. Pendamping SAD Bathin Sembilan/LSM

Pedoman wawancara untuk Pendamping SAD Bathin Sembilan/LSM berisi indikator-indikator pokok pertanyaan yang akan Penulis ajukan kepada narasumber tersebut. Narasumber dari Pendamping SAD Bathin Sembilan akan dipilih berdasarkan kapasitas narasumber yang aktif melakukan pendampingan terhadap gerakan perjuangan SAD.

Tabel 1.4

Pedoman Wawancara Narasumber Pendamping SAD Bathin Sembilan/LSM

No.	Indikator-Indikator Pokok
1.	Bentuk atau metode yang digunakan dalam mengadvokasi SAD Bathin Sembilan.
2.	Kontribusi Pendamping/LSM dalam upaya pembentukan dan pelaksanaan gerakan SAD Bathin Sembilan selama 6 tahun terakhir.
3.	Tantangan atau hambatan yang dirasakan oleh Pendamping/LSM dalam mengadvokasi SAD Bathin Sembilan (terutama dalam upaya pembentukan dan pelaksanaan gerakan sosial) selama 6 tahun terakhir

4.	Respon pemerintah terhadap upaya advokasi yang dilakukan oleh Pendamping/LSM kepada SAD Bathin Sembilan selama 6 tahun terakhir.
----	--

Sumber: Pribadi

3. Pemerintah

Pedoman wawancara untuk pihak pemerintah berisi indikator-indikator pokok pertanyaan yang akan Penulis ajukan kepada narasumber tersebut. Narasumber dari pihak pemerintah akan dipilih berdasarkan kapasitas narasumber yang secara langsung turun tangan terhadap penyelesaian konflik antara SAD Bathin Sembilan Desa Bungku dengan industri perkebunan kelapa sawit.

Tabel. 1.5

Pedoman Wawancara Narasumber Pemerintah

No.	Indikator-Indikator Pokok
1.	Posisi dan pandangan Pemerintah terhadap konflik agraria antara SAD Bathin Sembilan dengan industri perkebunan kelapa sawit.
2.	Respon Pemerintah terhadap gerakan sosial yang dilakukan oleh SAD Bathin Sembilan selama 6 tahun terakhir.
3.	Kontribusi atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap upaya penyelesaian konflik agraria antara SAD Bathin Sembilan dengan industri perkebunan kelapa sawit.
4.	Penyebab konflik berkepanjangan antara SAD Bathin Sembilan dengan industri perkebunan kelapa sawit.

Sumber: Pribadi

Narasumber di atas merupakan narasumber kunci dari penelitian ini. Apabila terdapat narasumber di luar dari yang dituliskan di atas, maka akan disesuaikan dengan peran narasumber tersebut apakah sebagai bagian dari SAD Bathin Sembilan,

Pendamping/LSM atau Instansi Pemerintahan. Bisa jadi juga, jika narasumber lainnya dapat berasal bukan dari narasumber di atas. Hal ini sangat bergantung terhadap kebutuhan data bagi Penulis selama melaksanakan penelitian.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan kepustakaan atau tinjauan literatur. Teknik wawancara ditandai dengan terjadinya komunikasi dari yang mewawancarai dan yang diwawancarai melalui interaksi secara langsung (Sugiyono, 2008: 137). Tujuan dari pemilihan teknik wawancara adalah guna diperoleh data yang lebih mendalam terkait suatu peristiwa atau realitas kejadian. Selama dilakukan wawancara, jawaban-jawaban narasumber akan direkam melalui *Sound Record* yang terdapat pada *smartphone* Penulis.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode semi-terstruktur. Rachmawati (2007: 36) mengatakan jika wawancara ini dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara. Sekuensi pertanyaan tidaklah sama pada tiap partisipan, namun bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap narasumber. Adapun pedoman wawancara yang telah disusun dapat dikembangkan oleh Peneliti sesuai dengan jawaban narasumber dan kebutuhan data yang diinginkan. Jumlah pelaksanaan wawancara pada tiap narasumber akan berbeda-beda, ada yang satu kali bahkan lebih dari satu kali tergantung pada kebutuhan dan kejelasan informasi yang diberikan.

Teknik pemilihan sample atau narasumber yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Menurut sugiyono (2016: 85), *purposive sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel dengan memerhatikan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud adalah kualitas narasumber dalam memberikan informasi. Pelaksanaan wawancara tidak dapat dilakukan dengan sembarang orang, namun harus dengan narasumber yang memiliki pemahaman terhadap peristiwa yang hendak dicari kebenarannya.

Sedangkan tinjauan literatur atau kepustakaan dilakukan melalui dokumen-dokumen yang tersedia, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar dan berita *online*. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan mencatat data-data yang telah ada sebelumnya. Data-data tersebut akan Penulis simpan di dalam *flashdisk* dan laptop untuk menghindari eror di salah satu lokasi penyimpanan. Sehingga mengurangi kekhawatiran terhadap kehilangan data.

Tujuan dari teknik ini adalah untuk melengkapi atau mendukung data penelitian. Selain itu, tinjauan literatur atau kepustakaan dihadirkan guna memverifikasi data primer sehingga diperoleh data yang lebih berkualitas. Penulis dapat melakukan uji silang antara data sekunder dengan data primer untuk memastikan bahwa data yang Penulis pahami benar-benar faktual tanpa ada manipulasi dari pihak-pihak tertentu. Alhasil, Penulis dapat mempertanggungjawabkan data yang dipaparkan dalam penelitian ini.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang diaplikasikan dalam Penelitian ini meminjam pemikiran Burhan Bungin (2003: 70), sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data (*Data Collection*). Pengumpulan data merupakan *first step* dan merupakan bagian integral dari proses analisis data. Dalam rangka upaya memenuhi kelengkapan informasi sebagai bahan analisis, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi kepustakaan/tinjauan literatur;
- b. Reduksi Data (*Data Reduction*). Setelah memperoleh data, proses selanjutnya adalah pemilihan atau pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis Penulis di lapangan. Reduksi data dilakukan sejak proses pengumpulan data, dimulai dengan menulis memo, membuat ringkasan, menelusuri tema, mengkode, membuat gugus-gugus dan sebagainya dengan maksud

menyisihkan/menyaring data/informasi yang tidak relevan dengan kebutuhan penelitian.

- c. *Display Data*. Merupakan kegiatan pendeskripsian sekumpulan data/informasi yang telah tersusun sebelumnya. Pendeskripsian ini nantinya yang akan memberikan probabilitas atau kemungkinan adanya pengambilan tindakan ke depan dan penarikan kesimpulan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks deskriptif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.
- d. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*). Merupakan tahap akhir dalam teknis analisis data dengan menyajikan kesimpulan atas seluruh kegiatan penelitian yang telah dilakukan, sekaligus menjawab persolan penelitian yang diajukan.

1.7.7 Kualitas Data

Guna memperoleh data yang relevan dan faktual, maka diperlukan upaya untuk menguji keabsahan suatu data. Tujuan dari pengujian keabsahan data adalah agar data yang diperoleh memiliki kualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan. Pengecekan dimaksud bertujuan untuk mengetahui apakah proses dan hasil yang diperoleh sudah dipahami secara benar oleh Penulis berdasarkan apa yang dimaksudkan narasumber.

Berikut beberapa cara yang dapat Penulis lakukan dalam mengimplementasikan teknik triangulasi data dalam penelitian ini:

- 1) Melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber yang memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan Peneliti;

- 2) Melakukan uji silang terhadap data yang diperoleh Peneliti melalui wawancara mendalam dengan data dari sumber literatur terverifikasi dan terpercaya;
- 3) Melakukan konfirmasi maupun uji silang terhadap data yang diperoleh oleh narasumber yang satu dengan narasumber lainnya.